

**PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN DI INDONESIA TAHUN 2007–2010**

*THE EFFECT OF THE GOVERNMENT INVESTMENT, EMPLOYMENT, AND FISCAL
DECENTRALIZATION ON ECONOMIC GROWTH OF REGENCIES
IN INDONESIA 2007-2010*

Mohammad. Rizal Mubaroq¹
Prof. Dr. Hj. Sutyastie S. Remi, SE., MS²
Dr. Ir. Bagdja Muljarjadi, S.E., M.S²

¹ Bappeda Kota Cimahi
² Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran

Januari 2013

Abstract

The purpose of this study was to analyze the factors that influence economic growth is the most commonly used indicator to measure the success of development in the region by using data unbalanced panel of districts in Indonesia. The research is based on the Solow economic growth model that uses two main production factors of capital and labor which are expanded by Samuelson and Nordhaus by adding other factors such as natural resources. The technology element is assumed fixed.

Variables in the study are Economic Growth as dependent variable with Government Investment, Employment and Fiscal Decentralization as independent variables. Data obtained from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance time series in 2007 - 2010. The analysis method used was Ordinary Least Square (OLS) with Fixed Effect Model and White Cross section as the standard error correction procedure.

The results showed that the positive effect of government investment 0.035% for every 1% increase in capital expenditure ratio to nominal GDP, Employment positive 0.004% for every increase of 1000 people labor, and Fiscal Decentralization positively 0.069% for each percent increase in the ratio of PAD against the Revenue. The three variables are significant at $\alpha = 1\%$ level.

Keywords: growth, government investment, labor, fiscal decentralization, solow

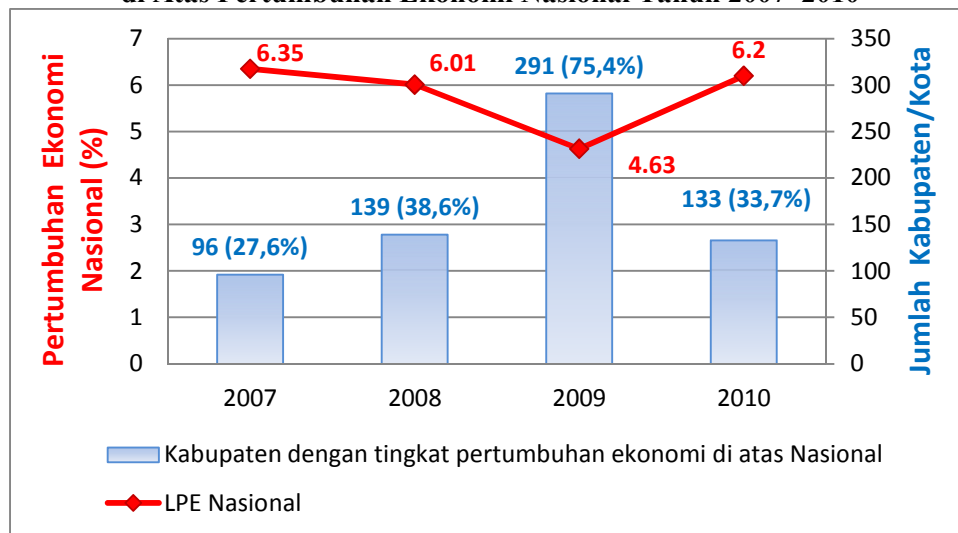
PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

Dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2010 terjadi 32 pemekaran di tingkat kabupaten kota dari semula 465 pada tahun 2007 menjadi 497 pada tahun 2010 dimana mayoritas daerah terdiri dari 399 kabupaten (atau sekitar 80,3%) sedangkan kota hanya berjumlah 98 kota (19,7%). Selain jumlah daerah yang lebih banyak, daerah kabupaten juga memiliki penduduk dan tenaga kerja yang lebih banyak, wilayah yang lebih luas, total PAD dan belanja pemerintah yang lebih besar..

Dari kabupaten yang ada, kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional cukup berfluktuatif dan bisa dikatakan berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk lebih jelasnya lihat ilustrasi berikut.

Gambar 1. Jumlah Kabupaten Yang Memiliki Pertumbuhan Ekonomi di Atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2007–2010



Sumber: BPS, olahan

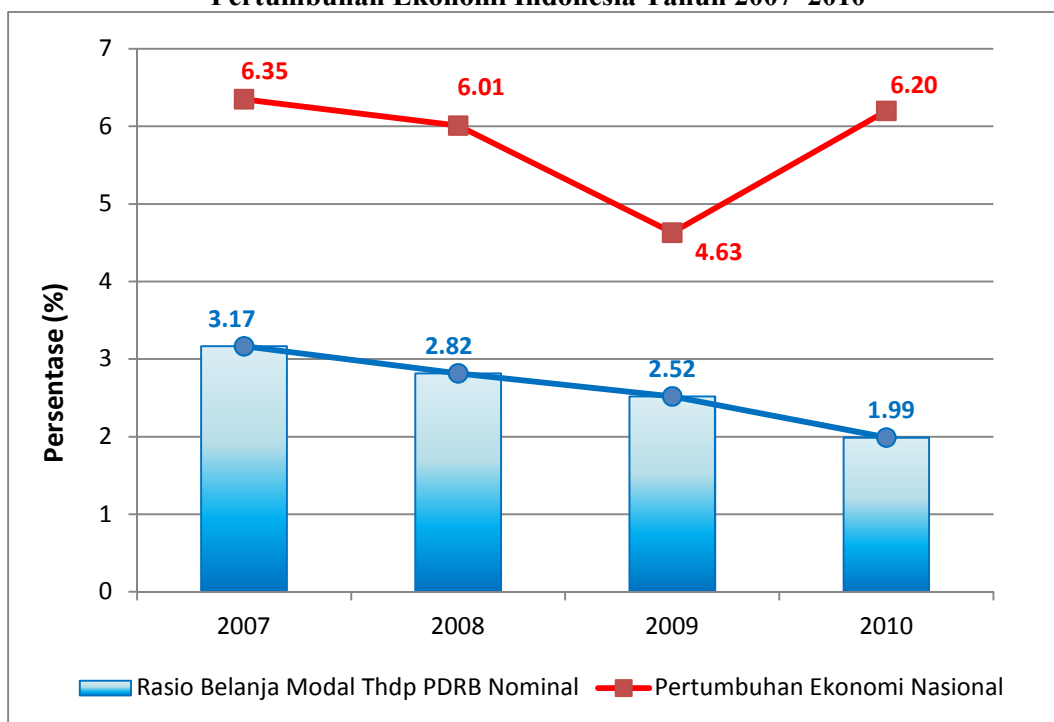
Keterangan :

Jumlah Kabupaten/Kota tahun 2007 = 465, tahun 2008 = 495, tahun 2009 dan 2010 = 497.

Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta perubahan teknologi sebagai sebuah unsur baru (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 250-258).

Secara nominal, meskipun belanja daerah selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi bila dilihat secara rasio maka rasio total belanja modal kabupaten kota terhadap total PDRB Nominal Kabupaten justru cenderung mengalami penurunan. Dari semula 2,17% pada tahun 2007 berangsur-angsur berkurang menjadi 1,37% pada tahun 2010.

Gambar 1 Perkembangan Rasio Total Belanja Modal Terhadap PDRB Nominal Kabupaten dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007–2010

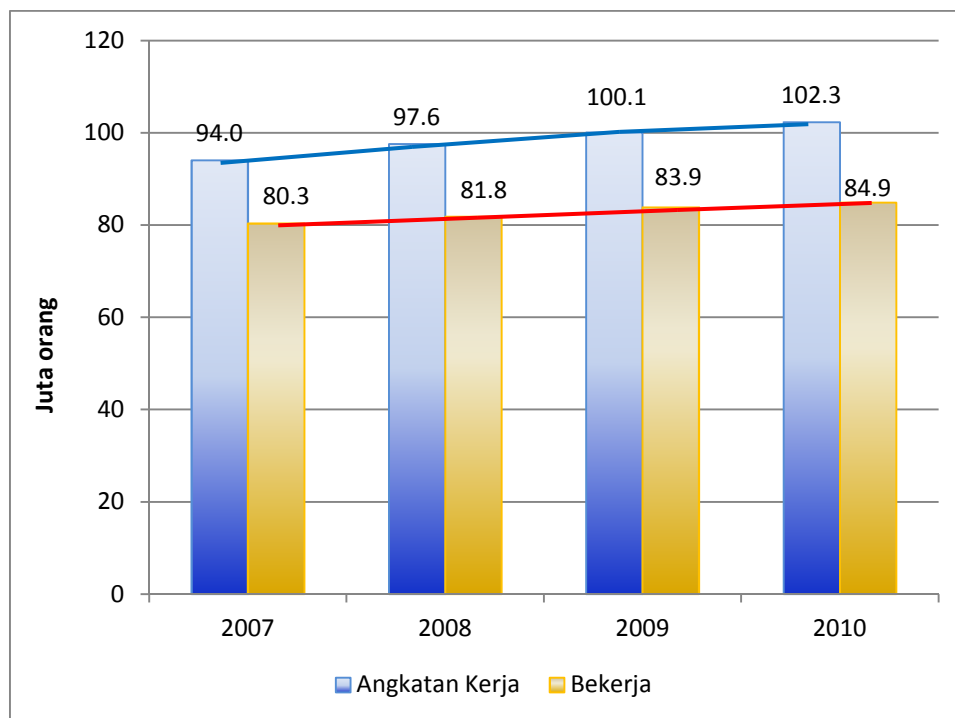


Sumber: BPS, olahan

Penelitian Sodik (2007) dengan menggunakan data panel 26 provinsi tahun 1993 – 2003 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian Abrar (2010) juga menunjukkan hasil serupa bahwa belanja pembangunan yang diproksi dengan belanja modal akan meningkatkan PDRB dan kecenderungan hubungan keduanya menunjukkan fungsi kuadrat.

Belanja modal pada pemerintah diantaranya digunakan untuk peningkatan infrastruktur fisik yang tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Pada periode 2007-2010, jumlah tenaga kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2007 sebanyak 99,9 juta jiwa kemudian berturut-turut meningkat menjadi 102,6 juta jiwa dan 104,9 juta jiwa pada tahun 2008 dan 2009 serta terakhir menjadi 108,2 juta jiwa pada tahun 2010. Perkembangan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007–2010 tersebut selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3 Penduduk yang Bekerja dan Jumlah Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2007–2010



Sumber : BPS, Keadaan angkatan Kerja Indonesia, olahan
Tidak termasuk kabupaten/kota di DKI Jakarta

Penelitian Sodik (2007) menghasilkan bahwa angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tanda yang negatif, hal ini menyiratkan bahwa daerah belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Disisi lain, penelitian Brata (2002) justru menunjukkan sebaliknya, bahwa ada hubungan dua arah antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Pembangunan manusia yang berkualitas akan mendukung pembangunan ekonomi dan sebaliknya kinerja ekonomi yang baik juga akan mendukung pembangunan manusia. Dengan demikian hal ini memperkuat indikasi bahwa masih ada hal lain yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Meskipun sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern, tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia pemanfaatan sumber daya

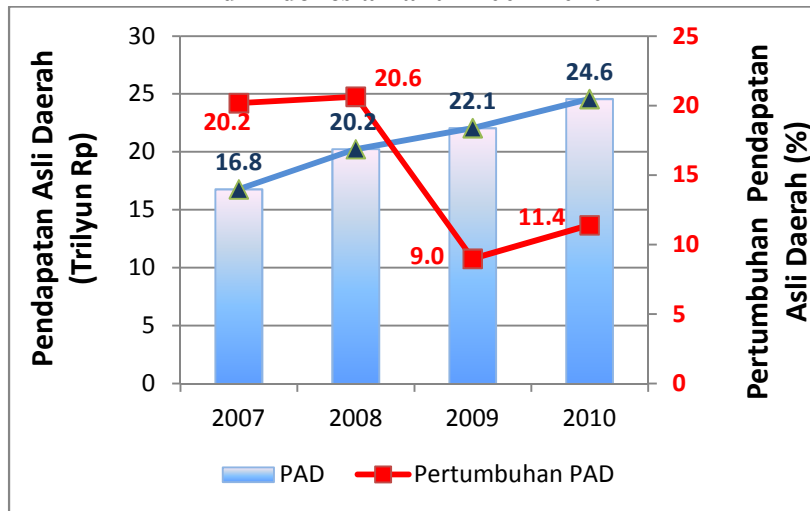
alam dapat menjadi penopang yang cukup dapat di andalkan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yakni untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya sehingga pelayanan publik yang dilakukan dapat menjadi lebih efisien dan efektif (Kuncoro, 2006: 521). Dengan demikian setiap daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan memilih sektor ekonomi unggulan berdasarkan potensi sumber daya daerah masing.

Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah (Kuncoro, 2006:497). Menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2007) desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Sesuai dengan amanat UU 32/200 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari sisi penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah (Riduansyah, 2003). Bahkan dapat dikatakan PAD merupakan barometer utama atas suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat. (Hidayat, 2007).

Secara nominal, perkembangan PAD kabupaten/kota di Indonesia tahun 2007–2010 terus mengalami peningkatan. Dari semula Rp Rp 16,8 trilyun pada tahun 2007, berangsur-angsur meningkat menjadi 24,6 trilyun pada tahun 2010. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan, pertumbuhan PAD pada tahun 2007–2010 justru berfluktuasi dan bisa dikatakan cenderung mengalami penurunan. Tingginya pertumbuhan PAD pada tahun 2007 dan 2008 yang mencapai 20,2% dan 20,6% menunjukkan upaya yang dilakukan daerah dengan memaksimalkan pengumpulan PAD. Dimana bagi daerah otonomi berarti upaya penggalakkan, penggalangan dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dengan cara apapun (Kuncoro, 2006:530).

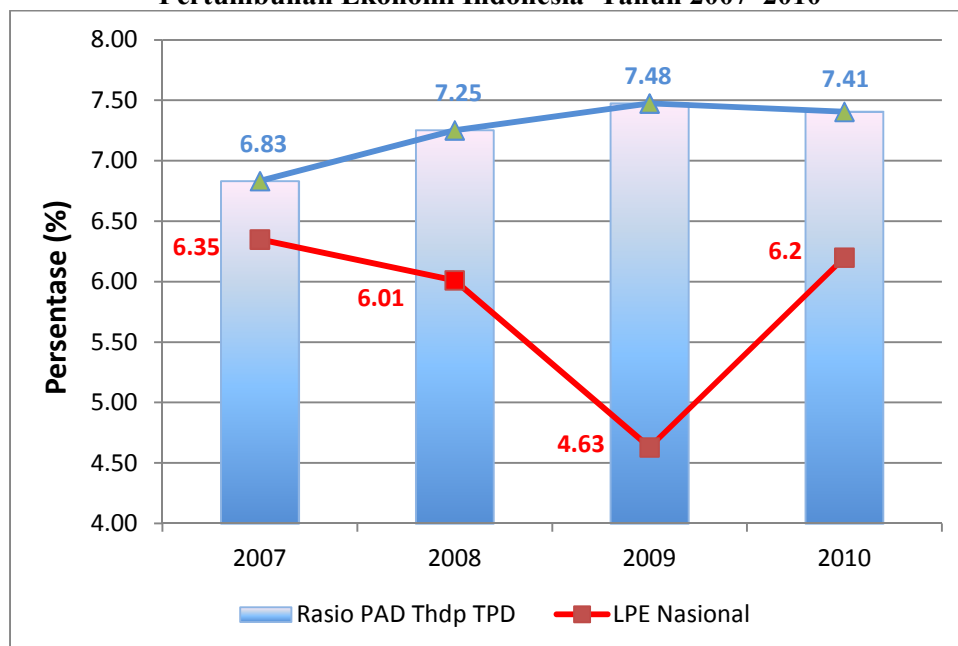
Gambar 4. Perkembangan dan Pertumbuhan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten di Indonesia Tahun 2007–2010



Sumber: BPS, DJPK Kemenkeu, olahan

Bila melihat pada tingkat kemandirian daerah yang diukur dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan pola kuadrat, dimana awalnya mengalami kenaikan hingga tahun 2009 yang mencapai 7,48% lalu mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 7,41%.

Gambar 5 Perkembangan Rasio Total PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007–2010



Sumber: BPS, DJPK Kemenkeu, olahan

Penelitian Sasana (2009) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal¹ memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian tersebut didukung oleh Pujiati (2007) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Semarang, dimana peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penelitian Hariyanto dan Adi (2007) terhadap kabupaten kota se-Jawa Bali tahun 2001 – 2004 juga menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah.

KAJIAN LITERATUR

Model Pertumbuhan Solow

Model pertumbuhan Solow sering juga direferensikan sebagai model pertumbuhan neoklasik merupakan ekstensi dari pertumbuhan Harrod-Domar. Model Solow menggunakan dua buah faktor produksi utama yakni modal dan tenaga kerja, serta sebuah unsur baru yakni teknologi. Modal dan tenaga kerja dapat saling mensubstitusi satu sama lain.

Solow mengasumsikan bahwa setiap faktor produksi akan mengalami *diminishing return*, yakni jika input ditambahkan terus menerus maka output akan bertambah tetapi dengan tingkat pertambahan yang semakin mengecil. Oleh karena itu investasi yang terus menerus belum tentu akan dapat memberikan pertumbuhan yang permanen. Dengan demikian kemajuan teknologi akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Bentuk model Solow didasarkan pada fungsi produksi sederhana dari Output Y, Kapital K dan tenaga kerja L serta teknologi T sebagaimana tampak pada persamaan berikut (Barro dan Sala-I-Martin, 2004:28) :

$$Y = F(K, L, T) \dots\dots\dots (1)$$

Dalam keadaan tanpa perubahan teknologi maka persamaan (II – 1) dapat ditulis sebagai berikut (Van Den Berg, 2001:115):

$$Y = F(K, L) \dots\dots\dots (2)$$

¹ Pada penelitian Sasana (2009) desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dibagi dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal.

Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave

Teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave dalam Dumairy (1996) dan Mangkusobroto (1998) merupakan suatu pandangan yang didasarkan pada pengamatan-pengamatan di banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Secara umum Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tiga buah tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal pengeluaran pemerintah untuk investasi merupakan bagian yang terbesar dari total investasi yang ada. Pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik seperti infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pada tahap menengah investasi dari swasta mulai berkembang tetapi pemerintah masih tetap memegang peranan besar guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Selain harus mengatasi kegagalan pasar yang terjadi, pemerintah juga harus menyediakan barang publik dalam jumlah yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi pada tahap ini menyebabkan hubungan antar sektor yang semakin kompleks. Rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil.

Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran untuk kesejahteraan sosial masyarakat seperti program kesehatan, jaminan hari tua dan lain sebagainya.

Pada intinya, teori Rostow dan Musgrave ini membagi pembangunan ekonomi ke dalam beberapa tahapan. Keterlibatan dan peran pemerintah semakin lama semakin berkurang seiring dengan semakin meningkatnya tahapan yang dilalui.

OBYEK PENELITIAN

Obyek yang akan diteliti adalah pengaruh berbagai faktor terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang merepresentasikan pertumbuhan ekonomi kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dalam penelitian ini dibatasi hanya pada investasi pemerintah, Tenaga kerja, dan kemandirian daerah masing – masing kabupaten di Indonesia

MODEL DAN DESAIN PENELITIAN

Model dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari model panel data yang digunakan Sodik dan Nuryadin (2005) sebagai berikut :

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 IP_{it} + \beta_2 TK_{it} + \beta_3 KD_{it} + CK + \varepsilon_{it} \quad \dots\dots\dots(III-6)$$

Dimana :

- PE : Pertumbuhan ekonomi kabupaten
- IP : Investasi pemerintah, rasio realisasi belanja modal terhadap PDRB nominal kabupaten
- TK : Jumlah Tenaga Kerja

- KD : Kemandirian Daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal, berupa rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Total Pendapatan Daerah kabupaten
- CK : PDRB riil Per Kapita kabupaten

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel ada tiga metode yang akan diangkat yaitu metode *Ordinary Least Square (common effect)*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dari ketiga metode tersebut kemudian dipilih yang paling sesuai untuk digunakan dengan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian asumsi klasik dilakukan terhadap model. Dari hasil uji didapatkan model terbebas dari gejala otokorelasi dan multikolinearitas tetapi masih terdapat heteroskedastisitas. Menurut Ariefianto (2012:39-42) heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimator (β_i) menjadi bias akan tetapi standar error dari regresi menjadi bias oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan terhadap model. Salah satu prosedur koreksi yang dapat digunakan untuk koreksi pada standar error regresi adalah *Heterocedasticity Robust Standard Error* yang diperkenalkan oleh White (1982). Penggunaan metode tersebut tidak akan merubah nilai dari parameter akan tetapi hanya pada standard error. Selanjutnya dengan melihat pada beberapa penelitian lain seperti de Jager (2008) serta Roodposhti dan Valipour (2011) yang juga menggunakan metode tersebut pada data panel dengan model fixed effect, maka model fixed effect dalam penelitian ini juga akan dicoba diperbaiki menggunakan metode yang sama.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Eviews, ternyata terjadi perbaikan pada model fixed effect yang digunakan dalam penelitian khususnya pada standard error dan tingkat signifikansi. Variabel W (tenaga kerja) dan KD (kemandirian daerah) yang semula signifikan pada level $\alpha=10\%$ dan $\alpha=5\%$, setelah dikoreksi meningkat menjadi signifikan pada level $\alpha=1\%$. Oleh karena itu model fixed effect dengan prosedur koreksi White tersebut yang lebih tepat untuk digunakan.

Tabel 1 Perbandingan Model Fixed Effect Sebelum dan Setelah Dikoreksi Menggunakan White Cross Section

Variabel		Fixed Effect	
		Sebelum koreksi	Setelah koreksi
IP	Coefficient	0.03546200 ***	0.03546200 ***
	Std. Error	0.01314900	0.01096000
TK	Coefficient	0.00000404 *	0.00000404 ***
	Std. Error	0.00000222	0.00000150
KD	Coefficient	0.06917700 **	0.06917700 ***
	Std. Error	0.03304900	0.02087500
CK	Coefficient	0.00122600 ***	0.00122600 ***
	Std. Error	0.00007500	0.00034700
C	Coefficient	-3.57593800 ***	-3.57593800
	Std. Error	0.74902400	2.54889100

Sumber: olahan

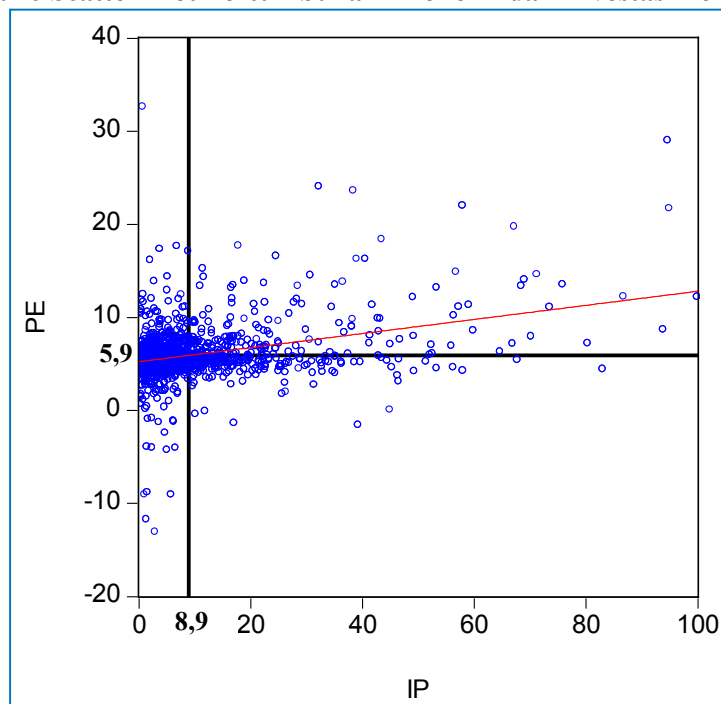
Keterangan:

- * : signifikan pada level $\alpha = 10\%$
 ** : signifikan pada level $\alpha = 5\%$
 *** : signifikan pada level $\alpha = 1\%$

- PE : Pertumbuhan ekonomi
- IP : Rasio Investasi pemerintah terhadap PDRB Nominal
- TK : Jumlah tenaga kerja
- KD : Tingkat kemandirian daerah
- CK : PDRB per kapita riil

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Eviews, Investasi pemerintah merupakan satu-satunya variabel yang memiliki tingkat signifikansi $\alpha=1\%$ baik dalam dalam scatter plot maupun dalam model Common Effect, Random Effect dan Fixed Effect. Hal ini mencerminkan bahwa Investasi pemerintah memiliki pengaruh yang kuat dan konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel Investasi Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf $\alpha=1\%$ dengan koefisien 0.035462. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen (rasio Belanja Modal terhadap PDRB) akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.035462 persen. Hasil ini sesuai dengan teori Pertumbuhan Sollow bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pembentukan modal atau kapital. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa penelitian lain seperti Sodik dan Nuryadin (2005), Waluyo (2004) serta Nasmi dan Ramizer (1997).

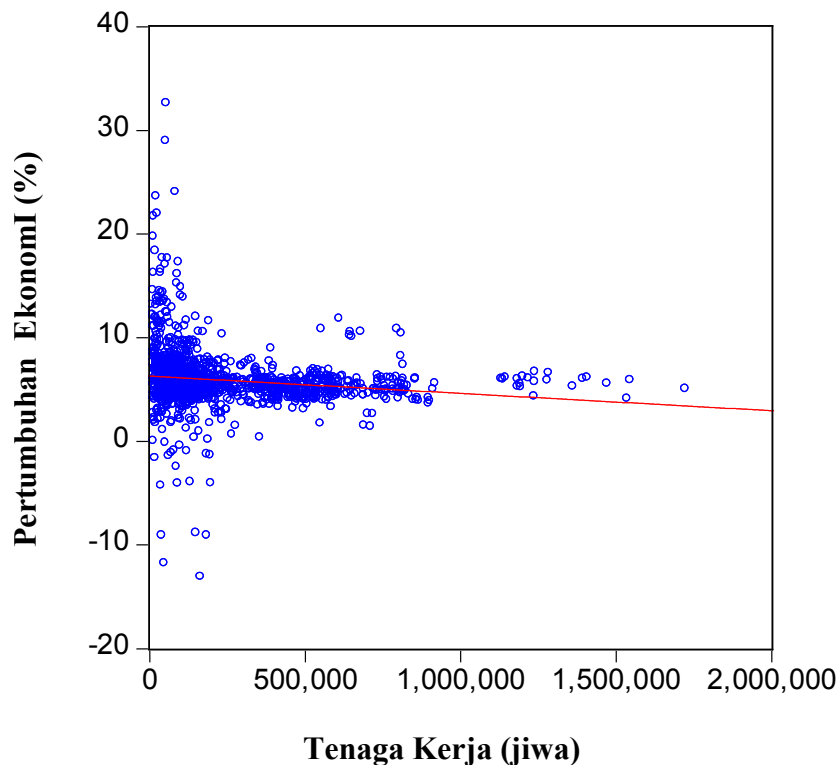
Gambar 6 Scatter Plot Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Pemerintah



- Sumber : BPS, Olahan
Data 395 kabupaten tahun 2007-2010 (1430 obesrvasi)
- Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi (%)
IP : Rasio Investasi Pemerintah terhadap PDRB Nominal (%)
Rata-rata PE= 5,9%
Rata-rata IP = 8,9%

Dalam penelitian ini terdapat kejadian yang menarik pada hubungan jumlah tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten di Indonesia pada kurun waktu 2007-2010. Bila melihat pada scatter plot yang ada pada gambar 7, slope dari trendline memiliki nilai negatif. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi jumlah tenaga kerja akan memberikan pengaruh negatif yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif tersebut menunjukkan adanya gejala penurunan produktivitas ketika semakin banyak jumlah tenaga kerja, seperti halnya teori *The Law of Diminishing Returns* yang diperkenalkan oleh David Ricardo. Akan tetapi apabila komponen tenaga kerja tersebut dimasukkan dalam model, justru memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Nazmi dan Ramirez (1997), Sodik dan Nuryadin (2005), serta Nurrohman dan Arifin (2010).

Gambar 7 Scatter Plot Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja



Sumber : BPS, Olahan

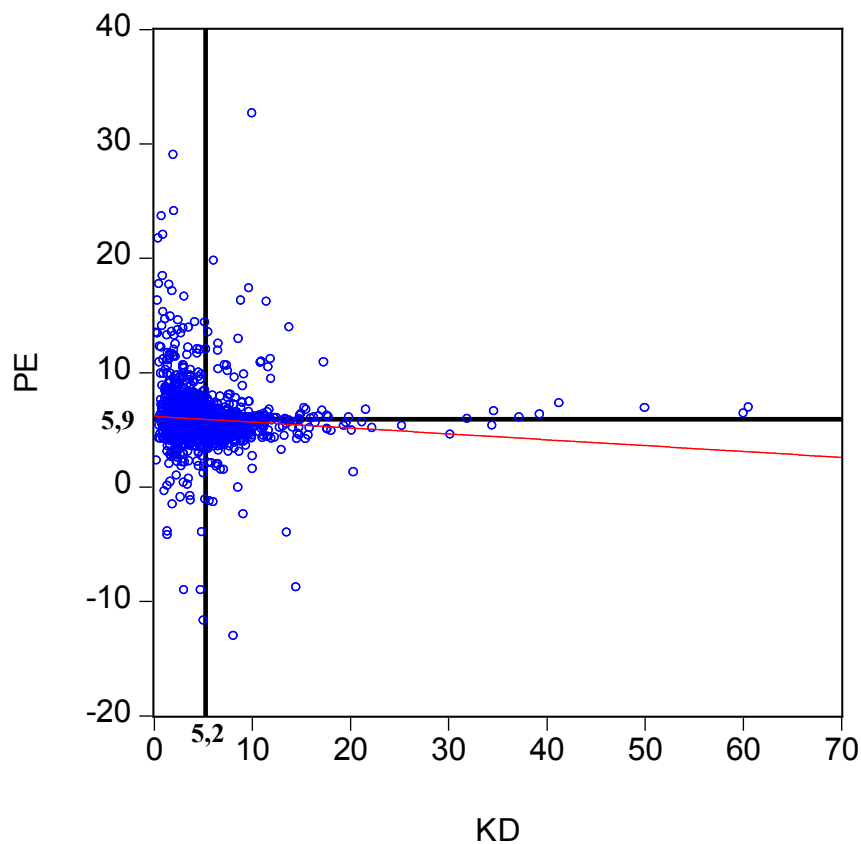
Data 395 kabupaten tahun 2007-2010 (1430 obesrvasi)

Dari hasil estimasi koefisien untuk variabel TK (tenaga kerja) adalah $4.04E-06$, yang berarti bahwa untuk setiap 1000 orang tenaga kerja akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004%. Hal ini tentu akan menguntungkan kabupaten yang memiliki jumlah tenaga kerja banyak seperti kab Bogor Provinsi Jawa Barat yang mencapai 1,7 juta

jiwa. Sedangkan bagi kabupaten yang jumlah tenaga kerjanya sedikit seperti kabupaten Supiori yang hanya 4.564 jiwa, tentu harus dapat mengandalkan faktor pendukung yang lainnya.

Bila melihat trend dari scatter plot, hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding terbalik, yakni semakin tinggi nilai kemandirian daerah maka akan semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun pengaruh desentralisasi fiskal kemudian menjadi positif ketika variabel kemandirian daerah digunakan dalam estimasi bersama variabel investasi pemerintah dan tenaga kerja. Hasil ini menggambarkan bahwa belanja daerah dari pungutan yang dibebankan kepada masyarakat diantaranya telah tepat, yakni digunakan pada belanja modal.

Gambar 8 Scatter Plot Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Daerah



Sumber : BPS, Olahan

Keterangan : scatter plot data 395 kabupaten tahun 2007-2010

PE : Pertumbuhan Ekonomi

KD : Kemandirian Daerah

Rata-rata PE = 5,9%

Rata-rata KD = 5,2%

Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan pemerintah dari PAD masih dapat meningkat selama tidak memberatkan masyarakat dan belanja yang dikeluarkan pemerintah dirasakan membantu masyarakat. Ketika memberatkan masyarakat maka pendapatan pemerintah akan menurun dan dampaknya belanja pemerintah pun akan menurun. Dengan demikian pola yang terbentuk akan menyerupai kurva Laffer.

Berdasarkan hasil estimasi, koefisien untuk variabel KD (kemandirian daerah) memiliki nilai sebesar 0,069177. Angka ini dapat diinterpretasikan sebagai setiap peningkatan 1 persen rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9%. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Samuelson dan Nordhaus bahwa Sumber Daya Alam merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Pujiati (2007) dan Setiyawati (2007).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian empirik dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi pemerintah, jumlah tenaga kerja dan desentralisasi fiskal kabupaten di Indonesia pada periode 2007-2010 memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi pada taraf $\alpha=1\%$.
2. Untuk setiap kenaikan 1% ratio belanja modal terhadap PDRB berlaku akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,035%.
3. Untuk setiap kenaikan 1000 orang tenaga kerja di kabupaten di Indonesia akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004%.
4. Desentralisasi fiskal yang diproksi dengan tingkat kemandirian daerah berupa rasio antar Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah juga akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,069% untuk kenaikan setiap 1% tingkat kemandirian daerah.

SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Investasi pemerintah kabupaten memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah kabupaten kota meningkatkan investasi pemerintah dalam bentuk memperbesar belanja modal dalam APBD .
2. Pemerintah kabupaten di Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktivitas menjadi lebih tinggi dan akhirnya akan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. PAD merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang memanfaatkan potensi daerah. Kebijakan dalam peningkatan PAD sebaiknya tidak memberatkan masyarakat

dan pungutan yang diperoleh juga sebaiknya didukung oleh pengeluaran pemerintah yang tepat dan produktif serta menunjang untuk pertumbuhan ekonomi.

4. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga masih dimungkinkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan kajian yang lebih mendalam, seperti penambahan sampel, variabel, cakupan, metode, dan lain sebagainya.

RUJUKAN

- Alkadri, 1999. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka.
- Anonimous, 2011. Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2007 – 2010. Badan Pusat Statistik.
- Anonimous, 2011. PDRB Kabupaten / Kota Tahun 2007 – 2010. Badan Pusat Statistik.
- Anonimous, 2011. Provinsi Dalam Angka Tahun 2007 – 2011. Badan Pusat Statistik.
- Ariefieanto, Moch., Doddy, 2012. Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EVIEWS. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Beck, Nathaniel dan Katz, Jonathan N., 1995. What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross Section Data. *The American Political Science Review*, Volume 89, Issue 3.
- El Anshasy, Amany A, 2012. Oil Revenues, Government Spending Policy, and Growth. *Public Finance and Management*. Volume 12, Number 2, pp 120-146.
- Gemmel, Norman. 1994. Perpajakan dan Pembangunan. Dalam Ilmu ekonomi Pembangunan: Beberapa Survai. Selected Reading, hlm 389 – 443. Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. Terjemahan: Nirwono.
- Hidayat, Agus. 2009. Pengaruh dana alokasi umum, PDRB per kapita dan investasi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten-kota di Provinsi Kalimantan Barat. Magister Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Hidayat, Paidi & Pratomo, Wahyu Ario & Harjito D. Agus, 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol. 12 No. 3, Desember 2007: 213 – 222.
- Karim, Zulkefly Abdul & Asri, Norain Mod, dkk. 2006. The Relationship Between Federal Goernment Revenue And Spending : Empirical Evidence From ASEAN-5 Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 11 No 2, Agustus 2006 : 91 – 113.
- Kuncoro Thesaurianto. 2007. : *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Thesis.
- Kuncoro, Haryo. 2007. Kausalitas antara penerimaan, Belanja, dan PDRB Pada Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 3, Desember 2007: 195 – 211.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta : Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta. Erlangga.

- Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten Di Indonesia*. Master Tesis. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kusumadewi, Diah Ayu. 2007. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia*. Volume 11 No. 1, Juni 2007: 67–80
- Mangkoesebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Nachrowi, D. Nachrowi & Usman, Hardius, 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis: Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurrohman, Riyadi dan Arifin, Zainal, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah; *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No. 1 Juli 2010: Hal 247 – 260.
- Pancawati, Neni, 2000. Pengaruh Rasio Kapital-Tenaga Kerja, Tingkat pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan GDP Indonesia ; *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.15, No.02, Universitas Gajah Mada, 2000.
- Prasasti, Diah, 2006. Perkembangan PDRB per kapita 30 Propinsi di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi ; *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.21, No.4, Universitas Gajah Mada, 2006.
- Prayitno, Hadi dan Budi Santosa, 1996. *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Prihatini, Alpa Fitria Galih (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah (Studi pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pujiati, Amin. 2007. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 3, Desember 2007: Hal 61 – 70.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003: 49-57.
- Santosa, Purbayu Budi & Rahayu, Retno Fuji. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*, Vol. 2 No. 1, Juli 2005: 9 – 18.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia
- Sebayang, Asnita Frida. 2005. Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10 No 3, Desember 2005 : 203 – 214.
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi, 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2007, Vol 4, No 2, hal 211-228.

- Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12 No 1, April 2007: 27 – 36.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Suryana, 2000. *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Susanti, A. Ayu Sari. 2010. *Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di masa otonomi pada pemerintah daerah di Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Negeri Malang.
- Sutrisno. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. BPFE UI, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit PT Grasindo. Jakarta.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Master Thesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Todaro, Michael. P, 1989. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Erlangga (Terjemahan).
- White, Halbert. A Heteroscedasticity – Consistent CovarianceMatrix and a Direct Test for Heteroscedasticity. *Econometrica*, Vol. 48, Number 4, May 1980: 817-838.
- Wibisono, Yusuf. 2005. *Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.02, Universitas Gajah Mada, 2005.

LAMPIRAN

Tabel 2. Correlated Random Effects - Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Q_KAB_INDO

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	322.222670	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IP?	0.035462	0.072100	0.000121	0.0009
TK?	0.000004	-0.000000	0.000000	0.0378

KD?	0.069177	0.025559	0.000698	0.0987
(CK?)	0.001226	0.000008	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PE?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/31/12 Time: 11:18

Sample: 2007 2010

Included observations: 4

Cross-sections included: 395

Total pool (unbalanced) observations: 1430

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.575938	0.749024	-4.774133	0.0000
IP?	0.035462	0.013149	2.696898	0.0071
TK?	4.04E-06	2.22E-06	1.819409	0.0691
KD?	0.069177	0.033049	2.093184	0.0366
CK?	0.001226	7.50E-05	16.34085	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.702507	Mean dependent var	5.913516
Adjusted R-squared	0.587665	S.D. dependent var	2.788567
S.E. of regression	1.790632	Akaike info criterion	4.233911
Sum squared resid	3305.760	Schwarz criterion	5.703076
Log likelihood	-2628.246	Hannan-Quinn criter.	4.782537
F-statistic	6.117150	Durbin-Watson stat	2.150700
Prob(F-statistic)	0.000000		

Table 3 Redundant Fixed Effect Tests

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Q_KAB_INDO

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.123071	(394,1031)	0.0000
Cross-section Chi-square	1550.756531	394	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PE?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/30/12 Time: 23:40

Sample: 2007 2010

Included observations: 4

Cross-sections included: 395

Total pool (unbalanced) observations: 1430

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IP?	0.073205	0.006126	11.94958	0.0000
TK?	-2.21E-07	3.33E-07	-0.663648	0.5070
KD?	0.007950	0.016696	0.476137	0.6341
CK?	-1.88E-05	1.06E-05	-1.770220	0.0769
C	5.391479	0.162605	33.15697	0.0000
R-squared	0.120075	Mean dependent var		5.913516
Adjusted R-squared	0.117605	S.D. dependent var		2.788567
S.E. of regression	2.619464	Akaike info criterion		4.767307
Sum squared resid	9777.771	Schwarz criterion		4.785718
Log likelihood	-3403.625	Hannan-Quinn criter.		4.774182
F-statistic	48.61416	Durbin-Watson stat		1.032404
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4. Model Fixed Effect dengan White Cross-section

Dependent Variable: PE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/01/13 Time: 05:35

Sample: 2007 2010

Included observations: 4

Cross-sections included: 395

Total pool (unbalanced) observations: 1430

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IP?	0.035462	0.010960	3.235607	0.0013
TK?	4.04E-06	1.50E-06	2.689688	0.0073
KD?	0.069177	0.020875	3.313921	0.0010
CK?	0.001226	0.000347	3.531282	0.0004

C -3.575938 2.548891 -1.402939 0.1609
 Fixed Effects (Cross)

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.702507	Mean dependent var	5.913516
Adjusted R-squared	0.587665	S.D. dependent var	2.788567
S.E. of regression	1.790632	Akaike info criterion	4.233911
Sum squared resid	3305.760	Schwarz criterion	5.703076
Log likelihood	-2628.246	Hannan-Quinn criter.	4.782537
F-statistic	6.117150	Durbin-Watson stat	2.150700
Prob(F-statistic)	0.000000		
